I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak.

Dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain (Muderis Zaini 1995:8).

Selain itu, salah satu harapan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum karena, misalnya ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Menurut Soedaryo Soimin, tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan di dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, sehingga seolah-olah apabila suatu perkawinan

tidak memperoleh keturunan, maka tujuan perkawinan tidak tercapai. Ini berarti, apabila di dalam suatu perkawinan telah ada keturunan (anak), maka tujuan perkawinan dianggap telah tercapai dan proses pelanjutan generasi dapat berjalan (Soerjono 2001:251).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada Pasal 39 ayat (1) salah satu tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun. Tujuan mengangkat anak diharapkan supaya ada yang memelihara di hari tua, untuk mengurus harta kekayaan sekaligus menjadi generasi penerusnya.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, perbuatan hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah peristiwa hubungan hukum antara orang tua angkat dan calon anak angkat. Terjadinya peristiwa hukum pengangkatan anak inilah sering menimbulkan permasalahan didalam keluarga, terutama mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta bagaimana kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilakukan melalui lembaga Pengadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum seperti yang dilakukan

oleh saudara R binti M, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. L A, Kabupaten Lahat, dengan duduk perkara: bahwa selama pernikahan Pemohon dengan mantan suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ke 3 (tiga) orang anak tersebut sekarang sudah berumah tangga dan tidak ada lagi yang menjadi tanggungan Pemohon. Kemudian anak laki-laki (calon anak angkat) yang bernama NHW tersebut mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yang masih dibawah umur dan masih menjadi tanggungan kedua orang tuannya. Orang tua kandung anak tersebut hanya bekerja sebagai pedagang kelontongan. Keinginan untuk membantu kehidupan anak baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi dimasa yang akan datang untuk perkembangan anak tersebut, selain itu diharapkan dimasa dewasa nanti terjadi tolong menolong antara anak yang diangkat dan orang tua angkat, maka dengan alasan tersebut saudara R mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama Kelas IB Lahat dan hasilnya dalam Penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt tentang permohonan pengangkatan anak, Pengadilan Agama Kelas IB Lahat mengabulkan permohonan Pemohon dan mengesahkan anak laki-laki bernama NHW bin KS sebagai anak angkat dari saudari R binti M.

Terjadinya peristiwa penetapan permohonan pengangkatan anak tersebut, muncul pertanyaan apakah pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan saudara R berstatus seorang janda/*single parent adoption* dan bagaimanakah akibat hukum penetapan Pengadilan Agama tersebut, apakah anak angkat dapat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Dipilihnya Penetapan perkara permohonan pengangkatan anak Pengadilan Agama Kelas IB Lahat Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt sebagai objek penelitian adalah karena kini pengadilan Agama juga berhak menerima dan memeriksa perkara pengesahan pengangkatan anak orang-orang yang beragama Islam, sehingga kasus-kasus permohonan pengesahan pengangkatan anak dan pembagian harta warisan bagi anak angkat dapat ditemukan di Pengadilan Agama Lahat. Selain itu, juga karena dalam perkara permohonan pengangkatan anak tersebut, calon anak angkat masih berstatus sebagai cucu kandung dari Pemohon.

Berpijak dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pengesahan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama yang akan penulis tuangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA KELAS IB LAHAT NOMER 03/Pdt.P/2008/PA.Lt TENTANG PERMOHONAN PENGANGKATAN ANAK”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian skripsi ini adalah:

1. Apakah alasan permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt?
2. Bagaimanakah mekanisme permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt?

4. Bagaimanakah akibat hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt mengenai status anak angkat dalam keluarga dan pembagian harta warisan?

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup bahasan. Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah bidang ilmu Hukum Perdata terutama dalam lingkup Hukum Keluarga, Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam. Ruang lingkup bahasan dalam penelitian ini mengenai akibat hukum penetapan Pengadilan Agama Kelas IB Lahat Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt terhadap kedudukan pemohon, status anak dan pembagian harta warisan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis:

1. Alasan permohonan pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt.
2. Mekanisme pengangkatan anak dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt.
3. Pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt.
4. Akibat hukum dalam penetapan Pengadilan Agama Nomor 03/Pdt.P/2008/PA.Lt mengenai kedudukan pemohon, status anak dan pembagian harta warisan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini meliputi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai hukum keluarga dan hukum waris khususnya waris anak angkat.

2. Secara Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan penulis khususnya mengenai mekanisme pengesahan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, menjadi bahan informasi dan atau sumber bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai acuan terhadap permasalahan yang terjadi, sumber data dan literatur perpustakaan serta sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.